

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan produktifitas organisasi yang dibantu dengan berkembangnya teknologi komputer diharapkan dapat menunjang proses pembuatan keputusan dan penyelesaian pekerjaan secara cepat, akurat, efisien dan efektif. Teknologi informasi adalah sebutan untuk penggunaan teknologi apa pun yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam hal membuat sesuatu, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi kepada pihak lainnya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governments, Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.” Hal ini mengarahkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mencapai pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Negara berdampak terhadap proses adaptasi satuan kerja (satker) dan para pengelola keuangan, baik ditingkat satker itu sendiri maupun KPPN. Munculnya berbagai peraturan yang baru terkait beberapa hal mengenai prosedur, aturan, dan sistem menyebabkan timbulnya perubahan yang harus diikuti. Perubahan yang secara cepat atau lambat, membuat seluruh pihak yang terlibat tetap harus dapat mengikutinya. Salah satu perubahan besar diakhir bergantinya sistem lama kepada SPAN yaitu terbitnya peraturan terkait pembaruan prosedur sistem yang lama. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN yang sudah menggunakan konversi dari sistem lama ke

SPAN. Selain itu Sumber Daya Manusia di tiap satker memiliki kompetensi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasi proses pencairan dana. Permasalahan yang timbul menyebabkan Satker harus datang lebih dari sekali dalam proses pencairan dana.

KPPN Semarang I sebagai instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan, maka tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

KPPN membutuhkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi agar tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, ekonomis, dan efisien. Maka dari itu, Kementerian Keuangan membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan negara terintegrasi yang disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan komponen transformasi berskala besar dalam pengelolaan perbendaharaan negara. SPAN bertujuan untuk menopang otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap lembaga dan untuk meminimalisir kesalahan input manual. Dengan adanya SPAN, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Efektifitas dapat diperoleh melalui data yang akurat, sedangkan efisiensi ditujukan agar pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan melalui sistem yang

terintegrasi. Sebagai pelaksana pencairan dana APBN, KPPN Semarang 1 harus menjamin pelayanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya dan transparan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Proses Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang 1”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Pencairan Dana APBN ?
2. Bagaimana mekanisme Pencairan Dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I ?
3. Apakah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, ekonomis, dan efisien ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan adanya latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Pencairan Dana APBN.
2. Untuk mengetahui mekanisme Pencairan Dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I.
3. Untuk mengetahui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara memberikan rekomendasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, ekonomis, dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu penulis mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Proses Pencairan Dana APBN sebagai implementasi terhadap teori – teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi masukan bagi perusahaan untuk penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Pencairan Dana APBN.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya tentang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam Pencairan Dana APBN.